






**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2018**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami atas nama peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2018 telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekomendasi hasil rapat kerja nasional;
2. Melaksanakan Rencana Aksi Hasil Sidang Komisi Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama pada Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Daerah, sebagai bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kementerian Agama; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil rapat kerja nasional serta pelaksanaan rencana aksi sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Agama.

Berita Acara Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2018

<b>Perwakilan Komisi I</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>	 <b>Nur Syam</b>
<b>Perwakilan Komisi II</b>	<b>Staf Khusus Menag</b>	 <b>Hadi Rahman</b>
<b>Perwakilan Komisi III</b>	<b>Dirjen Pendidikan Islam</b>	<b>Kamaruddin Amin</b> 

**Mengetahui/Mengesahkan  
Menteri Agama RI**

  
**Lukman Hakim Saifuddin**

## KOMISI I - SINERGITAS PROGRAM PUSAT DAN DAERAH - REFORMASI BIROKRASI

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Volume	Satuan	Waktu	Pola Penganggaran	Penanggung jawab	
1	Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada	1. terbentuknya regulasi tentang netralitas ASN	1. Penetapan KMA tentang netralitas ASN	1	Dokumen	Februari s.d. desember	DIPA Pusat	Sekjen dan Irjen	
			2. Sosialisasi KMA	120	satker Pusat dan Daerah				DIPA Pusat dan Daerah
		2. terwujudnya kesadaran yang tinggi dalam menjaga ketidakberpihakan	1. Internalisasi tentang netralitas ASN						
			2. Diseminasi tentang netralitas						
			3. terwujudnya sikap dan perilaku ASN Kemenag yang tidak berpihak pada partai politik dalam Pilkada dan Pileg	1. Pembinaan secara berjenjang kepada ASN Kemenag thd netralitas					
		2. Pengawasan oleh pimpinan satker masing-masing							
		3. Penindakan terhadap netralitas ASN kemenag							
		4. terwujudnya penegakan etika dan hukum bagi ASN Kementerian Agama	1. Pengawasan secara berjenjang						
			2. Sosialisasi PMA tentang Netralitas						
		2	Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Nilai indeks reformasi birokrasi, dan Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1. Manajemen Perubahan, memperkuat implementasi 5 nilai budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RB, dengan menggunakan Diklat, Sosialisasi, workshop dan lokakarya.		11	pusat Kanwil PTKN	Januari s.d. Desember (12 bulan)
2. Penataan dan Penguatan Organisasi, meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Agama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi kemenag menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.	34								
3. Penataan Peraturan Perundang Undangan, melalui evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang diterbitkan Kementerian Agama.	71								
4. Penataan Sumber Daya Manusia, meningkatkan profesionalisme SDM aparatur kemenag yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.									
5. Penataan tata laksana, meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja.									

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Volume	Satuan	Waktu	Pola Penganggaran	Penanggung jawab
			6. Penguatan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, seperti tertulis pada Undang undang no. 28 tahun 2009 7. Penguatan akuntabilitas kinerja, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi kemenag. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih berkualitas.					
3	SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan	1. terlaksananya pertemuan majelis agama dan lembaga keagamaan tingkat nasional, tk. Provinsi, tk. Kabupaten/kota dan tk. Kecamatan dalam rangka penguatan moderasi agama 2. terwujudnya kesepakatan para tokoh agama tentang pilkada damai (bagi daerah yang melaksanakan pilkada) dan kedamaian secara umum di wilayah masing-masing	melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Nasional.  melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Provinsi  melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Kab/kota  melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Kecamatan	7  34  50  152	kegiatan  kegiatan  kegiatan  kegiatan	Maret s.d. Nopember  Maret s.d. Nopember  Maret s.d. Nopember  Maret s.d. Nopember	DIPA Pusat (PKUB dan Ditjen Bimas Katolik, Hindu, Kristen, Buddha, dan Pusat Konghucu)  DIPA Setjen dan Kanwil (bagi yg belum ada mohon direvisi)  DIPA Kanwil (PKUB)  DIPA Kankemenag (KUB)	Setjen dan Ditjen Bimas Agama  Kanwil Kemenag Provinsi  Kanwil Kemenag Provinsi  kankemenag Kab/Kota
		3. terwujudnya kerukunan inter dan antar umat beragama	menyelenggarakan survey indeks kerukunan umat beragama	1	kegiatan	Maret s.d. Nopember	DIPA Puslitbang Bimas Agama dan Layanan	Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
4	NGOPI – Ngobrol Pendidikan Islam	terselenggaranya kegiatan NGOPI dari 57 PTKIN dan 34 Kanwil Kemenag Prov	merevisi RKA-KL dan kegiatan yang tidak efektif ke kegiatan NGOPI di satker masing-masing dengan anggaran @Rp. 200 juta	2	kali	Mei-September	Sarasehan dan dialog	Pimpinan PTKIN dan Kakanwil
5	BERKAH - Belajar Rahasia	1. meningkatnya pemahaman terhadap makna perkawinan 2. meningkatnya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin  3. menurunnya stunting  4. terwujudnya keluarga sakinah  5. menurunnya angka perceraian	1. mengefektifkan peran KUA dalam bimbingan perkawinan 2. memberdayakan penyuluh agama  3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan ormas	149.646	catin	Februari s.d. Desember	DIPA Kankemenag cq. KUA	KUA kecamatan

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Volume	Satuan	Waktu	Pola Penganggaran	Penanggung jawab
6	Bina Kawasan dan Guru Kunjung	Mengirim guru-guru agama honorer di wilayah 3T	Distribusi tenaga agama guru honorer di wilayah 3T dengan biaya @3.5jt perorang	20	provinsi	12 bulan	APBN dan APBD	Ka Kanwil Kemenag Prov
		Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di wilayah 3T	Memberikan bantuan insentif kepada guru-guru agama honorer di wilayah 3T	200	orang			
		Menjaga NKRI						
		Mengirim guru-guru profesional di wilayah 3 T	Rekrutmen guru profesional	10 hari /thn	2 orang x 20 Provinsi	10 hari/tahun	APBN dan APBD	Ka Kanwil Kemenag Prov
		Melakukan pendampingan guru di wilayah 3T	Mengalokasikan anggaran					
			Pembinaan kelompok guru Profesioanl di wilayah 3 T			12 bulan		
7	TPG/Dosen	Tersedia data guru dan dosen yang valid, penerima TPG/TPD	Melaksanakan verifikasi dan validasi data;	243.341 Guru; 7.547 Dosen	Orang	Bulanan dan Triwulan	Pusat dan Daerah	Seluruh Ditjen Bimas Agama dan Pendis
		Tersedianya anggaran	Mengalokasikan anggaran					
		Terbayarnya Tunjangan Profesi	menyiapkan petunjuk teknis dan mekanisme pembayaran					
		Terlunasnya Pembayaran Tunjangan Profesi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pembayaran TPG/TPD					

## KOMISI II - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Volume	Satuan	Waktu	Pola Penganggaran	Penanggung jawab
1	E-Government, Layanan Online, dan Komunikasi	1. Tersusunnya standar pelayanan 2. Tersedianya sarana pelayanan 3. Terintegrasinya sistem pelayanan 4. Tersedianya tenaga pelayanan	Menyusun standar pelayanan, membangun sarana pelayanan, mengintegrasikan sistem pelayanan, dan mengadakan tenaga pelayanan	40	Pusat, Kanwil dan UIN	Feb - Des	DIPA Pusat DIPA Kanwil DIPA UIN Surabaya, UIN Yogyakarta, UIN Riau, UIN Jakarta, dan UIN Bandung	Sekjen Eselon I Seluruh Ka. Kanwil dan Rektor UIN
2	SAPA - Menyapa Penyuluh Agama	Penyuluh agama telah mendapatkan pembinaan langsung dan terdata dalam aplikasi khusus	Melakukan pembinaan langsung, menyediakan aplikasi e-Kinerja penyuluh dan inputing data	34	Pusat & Kanwil	April-Des	DIPA Pusat DIPA Kanwil	Seluruh Dirjen Bimas dan Kepala Kanwil
3	MORA Cyber Team – Pengelolaan Medsos	Terbentuknya Tim Cyber MORA yang terintegrasi	Membentuk Tim Cyber Pusat, menyediakan dan mengelola konten Tim Cyber	1	Pusat & Kanwil	Feb - Des	DIPA Pusat DIPA Kanwil	Sekjen, Karo HDI
4	JAMARAH - Jalur Manasik Haji dan Umrah	Tersedianya media konsultasi Haji dan Umrah	Menyediakan bimbingan dan konsultasi tentang ibadah haji dan umrah	35	Pusat dan Kanwil	Feb - Des	DIPA Pusat DIPA Kanwil	Dirjen PHU dan Kepala Kanwil
5	Bina Rumah Ibadah	Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi dalam bentuk bantuan dan program pemberdayaan jamaah	Memberikan anggaran bantuan rumah ibadah dan program pemberdayaan jamaah	34	Pusat & Kanwil	Feb - Des	DIPA Pusat DIPA Kanwil	Seluruh Dirjen Bimas dan seluruh Kanwil
6	Kode Etik Ceramah	Terbitnya PMA tentang Kode Etik Ceramah Agama	Menyusun dan memastikan PMA dapat diundangkan	1	Pusat	Feb - Des	DIPA Pusat	Seluruh Dirjen Bimas, Karo Hukum dan KLN
7	Halal Indonesia	1. Terbitnya Regulasi JPH 2. Tersusunnya standar LPH 3. Tersediannya auditor halal bersertifikat 4. Tersedianya layanan registrasi dan sertifikasi halal 5. Tersedianya Juklak/Juknis komunikasi dan sosialisasi JPH	1. Mempercepat terbitnya regulasi 2. Membuat standar LPH 3. Membuat standar auditor halal 4. Menyusun standar, membangun sistem, dan pengadaan tenaga 5. Menjalankan Komunikasi dan sosialisasi JPH	16	Regulasi	Feb - Des	DIPA Pusat	Ka Badan JPH dan Karo Hukum dan KLN
8	Pengelolaan DUMAS	1. tersentralisasinya DUMAS 2. Tuntasnya pengaduan masyarakat	Menyempurnakan sistem penanganan pengaduan	1	Pusat	Feb - Des	DIPA Pusat	Irjen

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Volume	Satuan	Waktu	Pola Penganggaran	Penanggung jawab
9	Pengembangan Ekonomi Umat	1. terlaksananya gerakan sadar zakat di setiap provinsi 2. meningkatnya inklusi keuangan syariah 3. tersebarnya <i>Pilot Project</i> pemberdayaan zakat dan wakaf di setiap provinsi 4. terbentuknya lembaga filantropi 5. tersedianya sistem informasi data zakat dan wakaf	melakukan akselerasi pembentukan UPZ dan unit usaha syariah, meningkatkan edukasi keuangan syariah, melaksanakan <i>Pilot Project</i> kampung zakat, membentuk lembaga filantropi (Bimas), menyempurnakan sistem yang sedang dibangun bersama Bank Indonesia	15	Provinsi	Feb - Des	DIPA Pusat	Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, BAZNAS, dan BWI

## KOMISI III - BIDANG RISET DAN PENDIDIKAN

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Vol	Satuan	Waktu	Penganggaran	Penanggung Jawab
1	Digitalisasi	Digitalisasi dilakukan pada seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai kesiapan masing-masing PTKN. Khusus untuk hal yang sudah diperintahkan regulasi harus diprioritaskan	a. Penerbitan PMA tentang Keharusan Digitalisasi dan berikut Juklak dan Juknisnya	1	Dokumen	Jan-Jul	DIPA Pusat	Dit. Diktis & Biro Hukum
			b. Tuntasnya digitalisasi, seperti: digitalisasi presensi dosen, informasi umum tentang PTKN, perpustakaan, dan hasil penelitian.	1	Paket Program	Jan-Apr	DIPA PTKN	PTKN
		Terintegrasinya seluruh informasi tentang PTKN dalam satu sistem aplikasi di tingkat Kementerian yang <i>internationally accessed</i>	Pembangun sistem aplikasi yang integral terkait dengan PTKN dan peningkatan kapasitas jaringan ( <i>web-capacity</i> ) di PTKN dan Kementerian.	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan PTKN
		Penguatan sistem dan penambahan koleksi digital repository serta perpanjangan masa akses	Pemanfaatan layanan jurnal internasional secara elektronik, <i>e-book, Early Arabic Book (manuscript)</i> untuk PBM dan destinasi penelitian	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan PTKN
2	Penelitian	Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian pada topik non-agama dan pengembangan sains dan teknologi.	Proporsionalisasi anggaran untuk biaya penelitian	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat dan PTKN	Ditjen Pendis, Balitbang Diklat, dan PTKN
		Penguatan tingkat pemanfaatan hasil penelitian oleh dunia usaha/industri.	Mambangun kerjasama antara pengelola penelitian dengan dunia usaha/industri.	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat & PTKN	Ditjen Pendis, Balitbang Diklat, PTKN
		Penelitian monumental pada bidang sosial humaniora dan sosial keagamaan yang kontribusi besar pada permasalahan kemanusiaan.	Pengalokasian program dan anggaran oleh Kementerian Agama	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan Balitbang Diklat
		Mewajibkan seluruh dosen untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan yang	Penyusunan ketentuan tentang kewajiban penelitian dosen	1	Paket program	Jan-Des	PTKN	PTKN

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Vol	Satuan	Waktu	Penganggaran	Penanggung jawab
		diampunya sebagai konsekuensi tunjangan profesinya.	berdasarkan pada keilmuan yang diampunya					
		<i>Collaborative research</i> dikembangkan dengan melibatkan pihak luar	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuat program rutin <i>collaborative research</i>	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan Balitbang Diklat
		Penguatan dokumentasi hasil penelitian secara <i>hardcopy</i> dan digital.	PMA tentang kewajiban untuk mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan digital.	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan Balitbang Diklat
		Semua riset yang didanai Kementerian Agama dapat memproduksi ilmu pengetahuan dan menghasilkan karya bereputasi nasional dan internasional.	Penyelenggaraan pertemuan khusus untuk merumuskan <i>Grand Design</i> Nasional pada bidang Riset Keagamaan	1	Paket program	Jan-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan Balitbang Diklat
			Koordinasi intensif dengan Kemenriset Dikti terkait kebijakan penelitian nasional	1	Paket program	Agt-Des	DIPA Pusat	Ditjen Pendis
3	Internasionalisasi PTKN	Mendorong PTKN terutama yang berstatus universitas untuk menjadi <i>internationally recognition</i>	a. Penandatanganan MoU Kerjasama lintas negara untuk mengundang mahasiswa/dosen asing sebanyak-banyaknya. b. Optimalisasi <i>networking</i> antar profesor dan lembaga mancanegara c. Pemberian beasiswa pada mahasiswa asing	1	Paket program	Jan-Des	Ditjen Pendis	Ditjen Pendis & Biro Hukum-KLN
		Menjadikan web sebagai sarana penyedia komunikasi internasional berkenaan dengan PTKN	Peningkatan kualitas web dengan desain yang informatif, multi-bahasa, dan <i>fully accesseable</i>	1	Paket program	Mei-Okt	DIPA Pusat	Ditjen Pendis dan Balitbang Diklat
4	Riset Prioritas (10 tema)	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen PTKI tentang 10 riset tema besar yang meliputi: a. Integrasi keilmuan b. Islam transformatif c. Kesetaraan gender d. Islam Indonesia e. Kebijakan Kementerian	a. Melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai review proposal, penetapan penerima bantuan penelitian, pendampingan dan penilaian akhir penelitian secara terintegrasi dan terekam melalui	1000	Judul	Feb-Nov	DIPA Direktorat PTKI, DIPA Satker PTKN, DIPA Balitbang Diklat	Ditjen Pengelola Pendidikan Tinggi dan Balitbang Diklat



No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Vol	Satuan	Waktu	Penganggaran	Penanggung Jawab
		f. Moderasi Agama g. Relasi Agama dan Politik h. Aliran dalam Agama i. Relasi Ekonomi dan Agama j. Sosial keagamaan dengan <i>interdisciplinary studies</i> secara terintegrasi berbasis online, akuntable dan terpublikasi di jurnal terakreditasi.	www.litapdimas.kemenag.go.id sehingga dapat dipertanggungjawabkan. b. PTKN wajib membuat prioritas utama tentang topik penelitian. c. Kementerian mengalokasikan anggaran khusus untuk penelitian yang temanya bersinggungan dengan kebijakan kementerian.					
		Terbangunnya program prioritas kementerian berbasis riset	Puslitbang melakukan penelitian tentang berbagai program yang dilaksanakan oleh unit teknis (ditjen, setjen, BPJPH)	1	Paket penelitian		DIPA Pusat	Balitbang Diklat
5	NYANTRI – Magang Siswa/ Mahasiswa	Terselenggaranya magang mahasiswa sebanyak 500 orang mahasiswa PTKI	Pembangunan MoU Kerjasama antara PTKN lintas agama	500	Mahasiswa	Jul-Okt	DIPA Ditjen Pendis	Direktur PTKI
		Jumlah santri melakukan pendampingan daerah 3 T	Mengirim santri untuk mengajar dan melakukan pendampingan terhadap pesantren 3T	50	Pusat	Mar-Des	DIPA Pusat	Direktorat Pdpontren
6	Mengaji (Mengasah Jati Diri) Indonesia	Jumlah pengasuh/ustadz/santri terhadap komitmen NKRI	Melakukan pembinaan/pelatihan/workshop/so sialisasi/seminar terhadap pengasuh/ustadz/santri terhadap komitmen kenegaraan dalam bingkai NKRI	135	Pusat & Kanwil	Feb-Nop	DIPA Pusat DIPA Kanwil	Direktorat Pdpontren
7	BLU	1. Meningkatnya kinerja keuangan BLU pada PTKIN melalui pengelolaan BLU PTKIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1). melakukan akselerasi peningkatan kinerja keuangan dg mengidentifikasi permasalahan umum pengelolaan BLU pada PTKIN Kemenag dari mulai Perencanaan, pengelolaan keuangan, SDM, pengelolaan aset, tarif sampai pengawasan & pelaporan;	17	PTKIN	Mar-Des	DIPA Ditjen Pendis dan DIPA Satker PTKIN	Dit. PTKI

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Vol	Satuan	Waktu	Penganggaran	Penanggung jawab
		2. Meningkatnya kinerja layanan BLU PTKIN;	Melakukan akselerasi peningkatan kinerja layanan dengan mengoptimalkan penggunaan dana BLU pada PTKIN untuk peningkatan mutu PTKIN sesuai dg SNPT					
8	SBSN	Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana di PTKIN dengan terbangunnya 29 gedung kuliah, 1 perpustakaan, 5 laboratorium, 4 gedung dosen, 4 auditorium, 1 gedung layanan administrasi dan 1 asrama	Menyediakan alokasi anggaran bersama Bappenas dan Kemenkeu dalam pembangunan peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana PTKIN Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.08/2016	34 PTKIN	1 kali/pembangunan	Jan-Des	DIPA masing-masing Satker	KPA/REKTOR/KETUA
		Meningkatnya akses dan mutu sarana prasarana di madrasah	Menyediakan alokasi anggaran bersama Bappenas dan Kemenkeu dalam pembangunan peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana madrasah	32	madrasah	Jan-Des	DIPA masing-masing Satker	Kepala madrasah
9	PHLN	a. Dimulainya pembangunan gedung/fisik pada 4 PTKIN Program 4in1 ( UIN Sumatera Utara, UIN Palembang, UIN Semarang, UIN Mataram. b. Dimulainya pelelangan Equipment (peralatan/perlengkapan) pada PTKIN 4in1	Melakukan seangkaian kegiatan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti IDB dalam hal penerbitan NoL-nya dengan tepat waktu dan dengan ULP Kemenag dalam hal pelelangan equipment/perlengkapan/peralatan	4	PTKIN	Jan-Des	DIPA Direktorat PTKI, DIPA Satker 4 PTKIN	Direktur PTKI dan KPA Satker 4 PTKIN
		1. Tersedianya desain infrastruktur dan fasilitas pendidikan terkini dengan dimulainya review Detailed Engineering Design 2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di 6 UIN melalui beasiswa S2 dan S3, dalam dan di luar negeri.	Melakukan serangkaian kegiatan, seperti pelelangan PMSC dan EQC, mereview desain infrastruktur dan fasilitas pendidikan, melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dan kualitas manajemen, memberikan beasiswa/peningkatan kualifikasi	6	PTKIN	Jan-Des	DIPA Direktorat PTKI, DIPA Satker 6 PTKIN	Direktur PTKI dan KPA Satker 6 PTKIN

No	Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan	Implementasi (Cara Mengeksekusi)	Vol	Satuan	Waktu	Penganggaran	Penanggung Jawab
		<p>3. Meningkatnya kualitas manajemen universitas melalui training on higher education management bagi 60 peserta.</p> <p>4. Tersedianya data komprehensif PTKI melalui program Diagnostic Study on Islamic Higher Education, yang akan membantu penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan tinggi islam.</p>	S3 bagi Dosen pada 6 PTKIN 6in1					
10	UIII	(1) Disahkannya Ortaker dan Statuta UIII; (2) Dimulainya pembangunan 3 gedung (rektorat, fakultas, dan perpustakaan); (3) Tersusunnya kurikulum UIII; (4) Rekrutmen dosen.	(1) Melakukan koordinasi secara intensif kepada stakeholders; (2) Menyediakan anggaran untuk pembangunan; (3) Menyusun Kurikulum UIII, 4) Melakukan rekrutmen dosen.	10	Kegiatan	Jan-Des	DIPA Ditjen Pendis	Dit. PTKI
11	Buku Ajar	(1) Tersusunnya draft naskah buku teks PAI untuk SD, SMP, dan SMA/K. (2) Terbitnya PMA Penilaian Buku Teks Pendidikan Agama	(1) Membentuk tim penyusun buku teks PAI untk SD, SMP, SMA/K (2) Kerjasama dgn Pusat Perbukuan nasional dan penerbit buku nasional	12	Naskah	Juni-Des	Pusat	1. Direktorat PAI 2. Direktorat Madrasah 3. Balitbang Diklat
12	Indeks Kerukunan	Tercapainya Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam kategori baik, indeks 75,36 (2014), 75,47 (2016), 72, 67 (2017).	-Melakukan survey dilakukan pada 34 provinsi dengan responden sebanyak 210 pada setiap kabupaten/Kota. Jadi melibatkan 14.280 responden.	1	Paket penelitian	Apr-Nop		Kapus Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
13	Survei Kepuasan	Prosentase kepuasan layanan publik (layanan nikah di KUA dan Haji)	Ssurvey internal terhadap layanan KUA dan penyelenggaraan haji dalam negeri.	2	Kegiatan	Feb-Des	Pusat	Badan Litbang
14	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Kesalehan sosial dan dampak pendidikan agama serta pembangunan manusia	Melakukan survey pada provinsi2 yang kehidupan kerukunannya tinggi dan rendah konflik	1	Paket penelitian	Mei-des	pusat	Badan Litbang